



UPDATE KEADILAN

Periode: 28 Februari – 7 Maret 2005
Terbitan 7/2005

1. KEMAMPUAN TERDAKWA UNTUK DIADILI OLEH PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT

Putusan pertama dari Pengadilan Hukum Internasional bahwa seorang tidak mampu untuk diadili

Pada tanggal 1 Maret 2005, dalam kasus *Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat v Josep Nahak*, Hakim Tunggal, Hakim Phillip Rapoza, menjatuhkan putusan bahwa Josep Nahak tidak mampu untuk diadili. Ini putusan penting karena merupakan pertama kali Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) di Timor Leste mempertimbangkan persoalan kemampuan terdakwa untuk diadili, dan kedua kali sidang dilakukan oleh pengadilan internasional untuk menentukan apakah terdakwa mampu untuk diadili. Oleh karena tidak ada undang-undang domestik mengenai kemampuan terdakwa untuk diadili, Pengadilan harus menerapkan norma dan prinsip internasional, dan menetapkan sejumlah definisi prosedural yang berhubungan dengan kemampuan terdakwa untuk diadili. JSMP memuji Pengadilan tersebut karena melakukan analisa dan evaluasi terhadap persoalan yang relevan dan yurisprudensi yang dihasilkan.

Penerapan Hukum Internasional

Sebagaimana ditunjukkan dalam putusan kasus *Nahak*, pada saat ini tidak ada ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang dari seluruh perundang-undangan domestik yang cukup luas di Timor Leste yang secara langsung mengatur tentang persoalan kemampuan terdakwa untuk diadili. Faktor terpenting dalam kasus *Nahak* yang mewujudkan sidang semacam ini adalah kemungkinan untuk menerapkan prinsip umum atau prinsip yang telah ditetapkan dari hukum internasional ke dalam sistem hukum domestik melalui penerapan Pasal 9.1 dan Pasal. 9.2 dari Konstitusi Timor Leste, Pasal 3.1 dari Regulasi UNTAET 2000/15 dan TRCP Pasal 54.5. Putusan *Nahak* mengutip Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional, ICCPR dan yurisprudensi kolektif dari mahkamah-mahkamah internasional lain sebagai sumber pedoman umum tentang persoalan kemampuan terdakwa untuk diadili.

Norma dan prinsip yang nampak dari yurisprudensi tersebut menunjukkan keperluan yang melekat pada prosedur pidana untuk menentukan kemampuan terdakwa. Walaupun aturan ini dikutip dalam berbagai macam bentuk, aturan tersebut menjamin sejumlah hak, termasuk hak atas persidangan yang adil, hak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum sebelum persidangan, hak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk memanggil dan memeriksa saksi, dan hak untuk hadir (baik secara fisik dan mental) selama persidangan atas diri sendiri. Hak-hak ini dimaksudkan untuk

menjamin persidangan yang adil bagi terdakwa agar diberikan setiap kesempatan untuk menolak dakwaan yang dituduhkan kepadanya dan untuk menjamin bahwa terdakwa tidak dihukum dengan cara yang tidak adil.¹ Secara lebih luas, kasus *Nahak* menganjurkan bahwa “ada nilai sosial yang berkaitan dengan penentuan kemampuan terdakwa yang menyangkut hal-hal selain daripada kepentingan pribadi terdakwa”.² Kalau seorang terdakwa tidak mampu melaksanakan hak-hak tersebut, (misalnya terdakwa tidak dapat berbicara dengan pengacaranya) proses dan kualitas persidangan akan terancam secara berat. Dengan mengingat tuduhan bahwa Panel Khusus seringkali bersifat pro-penuntutan, putusan *Nahak* merupakan pernyataan penting mengenai persidangan bagi orang yang dapat menjadi rentan jika diadili oleh pengadilan yang kurang hati-hati.

Penetapan Definisi Hukum yang diperlukan untuk kepentingan Persidangan.

Selain daripada menegaskan pentingnya proses yudisial dan agar terdakwa mampu untuk diadili, putusan *Nahak* juga menyampaikan sejumlah definisi hukum yang sangat penting untuk proses penggelaran sidang untuk menentukan kemampuan terdakwa.

Putusan untuk menggelar Sidang untuk menentukan Kemampuan Terdakwa

Putusan *Nahak* menyatakan bahwa “harus ada keraguan tentang kemampuan terdakwa untuk diadili sebelum perintah dapat dikeluarkan untuk menggelar sidang untuk menentukan kemampuan terdakwa,”. Berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pihak Kejaksanaan dan Terdakwa, dalam perkara ini Pengadilan berpendapat bahwa ada “keprihatinan yang memadai” tentang kemampuan mental Josep Nahak untuk diadili. Namun, Pengadilan dengan hati-hati menjelaskan, dalam putusan akhirnya, bahwa apabila diputuskan bahwa terdakwa tidak mampu diadili maka hal ini tidak merupakan pembelaan, tetapi hanya menunda persidangan apabila terdakwa dianggap mampu di kemudian hari.

Definisi Mampu untuk diadili

Dengan menerapkan standar internasional dan standar domestik lain tentang kemampuan untuk diadili, putusan *Nahak* menyatakan bahwa:

‘seorang Terdakwa akan dianggap mampu untuk diadili apabila terdakwa itu:

- (1) Mempunyai pengertian yang rasional maupun faktual tentang dakwaan yang dituduhkan kepadanya;
- (2) Mempunyai pengertian yang rasional maupun faktual tentang sifat dan tujuan dari persidangan terhadap dirinya; dan
- (3) Kemampuan pada saat itu untuk berkonsultasi dengan pengacaranya dan untuk membantu menyiapkan pembelaannya dengan tingkat pengertian yang layak.’

JSMP senang bahwa definisi tersebut di atas sesuai dengan standar internasional yang mengatur tentang keperluan untuk proses hukum yang layak dan kesehatan mental pada tingkat tinggi.

Standar Pembuktian

Sekali lagi berdasarkan yurisprudensi dari yurisdiksi lain, Pengadilan tersebut menetapkan standar pembuktian yang agak rendah, yaitu berdasarkan “perbandingan

¹ Buku Pedoman *Amnesty* tentang Persidangan yang Adil, 1.

² *Nahak*, pasal. 48.

kemungkinan.” Putusan *Nahak* membenarkan putusan ini dengan alasan bahwa standar pembuktian yang lebih tinggi, yaitu standar pembuktian yang tidak dapat diragukan kembali, yang diperlukan untuk membuktikan unsur-unsur pelanggaran pidana, sebenarnya merupakan standar positif yang diperlukan untuk mengimbangi kemungkinan bahwa putusan bersalah dapat dijatuhkan secara keliru. Pada pihak yang lain, walaupun putusan tersebut sangat tidak diharapkan, sebagaimana tidak diinginkan dalam kasus *Nahak*, penilaian yang keliru tentang kemampuan terdakwa belum tentu menimbulkan resiko bahwa putusan bersalah dapat dijatuhkan secara keliru.

Beban Pembuktiaan

Walaupun Pengadilan tersebut memutuskan bahwa persoalan yang relevan di sini adalah apakah ‘bukti menunjukkan bahwa lebih mungkin terdakwa mampu untuk diadili daripada tidak mampu’³ dan tidak menetapkan ‘tanggungjawab untuk membuktikan hal tersebut’, Pengadilan mengakui bahwa dampak praktis dari pernyataan ini adalah memberi tanggungjawab kepada Jaksa untuk membuktikan bahwa terdakwa mampu diadili. Baik Pengadilan maupun JSMP tidak prihatin tentang kenyataan praktis ini karena sesuai dengan ketentuan yang mengatur bahwa putusan untuk menggelar sidang untuk menentukan kemampuan terdakwa hanya dapat diambil apabila terdapat keraguan yang signifikan tentang kemampuan mentalnya.

Kesaksian Ahli

JSMP merasa penting untuk berkomentar tentang persoalan yang dikemukakan oleh penggunaan kesaksian ahli dalam kasus *Nahak*.

Suatu kasus yang memerlukan kesaksian ahli akan menimbulkan argumen tentang persamaan antara perwakilan yang tersedia bagi kedua bela pihak di hadapan pengadilan. Hal ini sangat relevan bila sumber keahlian terbatas, seperti halnya di Timor Leste. Apabila semua sumber daya negara digunakan terhadap seorang individu, orang itu harus mempunyai akses terhadap sumber daya yang memadai untuk membantah dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Tentu saja pengacara terdakwa telah mempersoalkan kekurangan sumber daya yang tersedia bagi terdakwa, termasuk tidak tersedianya penilaian ahli lainnya, dan sebagai akibatnya kekurangan bukti untuk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa mampu diadili. Hal ini berpotensi untuk melanggar Pasal 2 dari *Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi* yang menjamin hak atas persidangan yang adil dan proses hukum yang layak. -

Lagipula, JSMP prihatin bahwa bukti yang disampaikan oleh satu-satunya saksi ahli pada esensinya tidak tepat untuk keperluan sidang tersebut. Daripada terfokus pada persoalan hukum yang terdaftar di bawah definisi ‘Mampu untuk diadili’, ahli psikiater yang memberi kesaksian menyampaikan semacam penilaian antropologi bahwa keterbatasan *Nahak* bersifat kultural dan bukan mental, dan oleh karena itu hal ini dapat ditemukan pada setiap orang Timor Leste. JSMP keberatan pada anjuran tersebut yang merupakan hinaan terhadap orang Timor Leste maupun kemanusiaan universal. Untungnya Pengadilan dapat mengacu pada kesaksian dari Konselor PRADET asal Timor Leste Mr Florentino de Carvalho dan Manajer Kasus PRADET asal Timor Leste Mr Antonio Ximines bahwa tingkah laku Josep Nahak tidak sesuai dengan kebiasaan budaya di Timor Leste dan bahwa Josep Nahak memang sakit jiwa.

³ *Nahak*, pasal. 67.

Persoalan terpenting dalam kasus *Nahak* adalah perkembangan yurisprudensi tentang persidangan yang adil. Hak atas persidangan yang adil diperlukan untuk menjamin integritas sistem peradilan dan cara yang digunakan oleh pengadilan semacam ini untuk menangani orang rentan mencerminkan kualitas keadilan yang diberikan. Hal ini sangat penting pada jaman sekarang dimana ada begitu banyak mahkamah internasional di keadaan pasca konflik dimana para peserta tentu saja dapat menderita sakit jiwa yang mengiringi atau diperburuk oleh trauma yang dialaminya dan JSMP memuji Hakim Rapoza dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat karena menggunakan pendekatan yang sensitif dan teliti terhadap hukum yang relevan dan penerapannya di Timor Leste.

2. PENUNDAAN DAN PEMBATALAN DI PENGADILAN TINGGI

Selama bulan Februari, JSMP mengamati bahwa semua sidang dan persidangan yang ditetapkan dalam jadwal Pengadilan Tinggi, dimulai setelah ditunda selama sekurang-kurangnya satu jam, atau dibatalkan.

Pada tanggal 3 Maret, sidang yang dijadwalkan untuk pukul 11.00 pagi ditunda sampai pukul empat sore. Setelah penundaan pertama, ternyata sidang tersebut dimulai 50 menit setelah waktu yang ditetapkan.

JSMP mengakui jumlah pekerjaan yang harus ditangani oleh Pengadilan Tinggi setiap hari (sebagaimana diketahui JSMP, Pengadilan Tinggi telah mengadili banding dalam 8 kasus pada tahun 2005). JSMP juga mempertimbangkan kenyataan bahwa Pengadilan Tinggi harus menangani beberapa persoalan dan kejadian darurat yang dapat timbul tiba-tiba. Namun, kami terpaksa untuk menyampaikan keprihatinan kami tentang persoalan penundaan yang merupakan masalah yang terjadi berulang kali.

Sebagaimana diketahui oleh JSMP, para pihak hanya diberitahu tentang penundaan dan pembatalan setelah menunggu cukup lama di ruangan sidang dengan harapan bahwa sidang akan dimulai. Sebagai contoh, 50 menit setelah waktu yang ditetapkan, panitera memberitahu Jaksa Penuntut Umum (dari Kantor Kejahatan Berat) bahwa sidang itu tidak akan digelar pada pagi hari, melainkan akan digelar pada pukul 4.00 sore.

Penundaan dan pembatalan semacam ini tidak hanya merusak operasi pengadilan tetapi cukup menyia-nyiakan waktu para aktor pengadilan. Lagipula, penundaan tersebut menimbulkan penderitaan emosional yang tidak perlu pada tersangka, korban dan masing-masing keluarganya, yang semua berada dalam situasi yang menimbulkan kecemasan.

JSMP percaya bahwa aspek-aspek negatif tersebut harus dipertimbangkan dan maka dengan mudah dapat dihindari. Oleh karena itu, kami merekomendasi agar, apabila mungkin, jadwal Pengadilan Tinggi dirubah secepatnya untuk memberi waktu yang memadai supaya para pihak dapat diberitahu tentang kemungkinan sidang akan ditunda.